



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIKA SUSANTY
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 421967

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.731.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 686.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/287 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.055.000.000
4. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 10005 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 1.850.000.000
6. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 87.100.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 124.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 591.270.025

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.083.338.363

F. HARTA LAINNYA

Rp. 350.066.928

Sub Total

Rp. 8.967.275.316



III. HUTANG

Rp.

8.979.658

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

8.958.295.658

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.